

Enterpreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah Di Kabupaten Sorong Selatan

Fransina B. Thesia¹, Muhammad Ali², Arie Purnomo³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perspektif pejabat birokrasi pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dalam menerima dan memahami ide *Enterpreneurial Government*; dan untuk memahami faktor-faktor penjas persepsi pejabat birokrasi Kabupaten Sorong Selatan dalam menerima ide *Enterpreneurial Governmen*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kuisisioner (angket); wawancara; observasi; dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan sejumlah 846 buah jabatan structural, adapun sampel penelitian diambil sebanyak 50 orang dan ditentukan menggunakan teknik *stratified random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada keraguan dan ketidakpahaman pegawai terhadap aspek-aspek yang ada pada *Enterpreneurial Government* sehingga dapat disimpulkan pandangan dan pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep *Enterpreneurial Government* masih sangat rendah.

Kata Kunci: *Enterpreneurial Government*, Birokrasi Pemerintah, Sorong Selatan

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa dengan jatuhnya rejim Soeharto bertujuan untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi diharapkan menjadi jalan bagi penyelesaian permasalahan bangsa yang dihadapi dan menjadi harapan bagi masyarakat sebagai momentum untuk menemukan cara baru dalam mendesain jalannya roda pemerintahan, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Gerakan Reformasi menuntut adanya perubahan struktur, kultur dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan terutama birokrasinya. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi pemerintahan mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang terjadi selama ini.

Pemerintahan reformasi yang ada selama ini dinilai kurang responsif dan tidak peka terhadap tuntutan perubahan, aspirasi dan dinamika yang terjadi dimasyarakat, belum mampu mengantarkan bangsa keluar dari himpitan krisis serta belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan yang berarti. Perebutan kekuasaan antar elit politik lebih mewarnai jalannya reformasi dengan adanya pergantian presiden yang begitu cepat tanpa diikuti dengan tindakan nyata kearah perbaikan. Tingkat kepercayaan rakyat pada integritas pemerintahanpun mulai

dipertanyakan dan menunjukkan gejala penurunan dengan banyaknya bentuk ekspresi ketidakpuasan rakyat seperti main hakim sendiri, demonstrasi, protes, kecaman, cacimaki terhadap birokrasi publik bahkan ada sebagian daerah berkeinginan untuk berpisah dari Indonesia. Pemerintah dengan birokrasinya yang diharapkan menjadi jalan pemecahan masalah tetapi malah menjadi sumber masalah dari permasalahan yang dihadapi bangsa. Berbagai bentuk penyakit birokrasi (*bureau-pathologies*) (Caiden, 1991) adalah merupakan hasil dari kepongahan dan salah urusnya (*mis-management*) para penyelenggara negara disemua tingkatan dan pada semua sektor kehidupan.

Dalam upaya merespon dinamika masyarakat dan berbagai tuntutan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keberadaan undang-undang ini memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan menawarkan berbagai kemungkinan untuk diterapkannya paradigma baru dalam menata kembali sistem pemerintahan daerah dan menemukan cara-cara baru dalam menjalankan birokrasi publik dengan efisien, efektif, responsif, transparan dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Daerah dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah yang pada akhirnya pemerintah daerah dapat menentukan disain dan model birokrasi publik yang tepat untuk merespon tuntutan, aspirasi dan dinamika yang terjadi dimasyarakat. Kegagalan dalam merespon tuntutan perubahan itu bisa menciptakan sumber konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengganggu legitimasi dan jalannya roda pemerintahan.

Untuk mendisain dan menentukan model birokrasi yang tepat maka perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap '*anatomi*' dan '*kode genetika*' birokrasi publik di Indonesia agar dapat terwujud birokrasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Osborne dan Plastrik (1997,48) mengatakan dengan tegas dan menjadikannya sebagai *the first rule of reinvention : No new DNA, No Transformation*. Terlebih lagi bagi daerah Kabupaten atau Kota termasuk Kabupaten Sorong Selatan dalam memasuki era otonomi daerah, yang mengharuskan mereka mandiri untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri ditengah kompetisi global serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan peran birokrasi publik yang sebenarnya. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sudah saatnya untuk mereposisi peranannya kembali menjadi birokrasi publik yang memiliki akuntabilitas, responsif, inovatif dan profesional serta

berjiwa *entrepreneur*. Pola-pola lama dalam kultur birokrasi, kepemimpinan, struktur kelembagaan, manajemen sumber daya manusia dan sebagainya harus diorientasikan kearah pembentukan birokrasi publik yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat dan mengglobal.

Konsep perubahan birokrasi publik pada dasarnya sudah lama (1980-an) dikenalkan oleh para teorisi seperti Hood dan Pollitt, sebagai kritik terhadap kinerja birokrasi lama (model weberian) yang sudah tidak mampu memenuhi harapan masyarakat seiring dengan perubahan lingkungan strategis. Sebagaimana tesis yang dikemukakan David Osborne dan Ted Gaebler (1992, 13) bahwa : “bentuk pemerintahan yang berkembang selama era industri, dengan birokrasi yang lamban dan terpusat, pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan serta rantai komando, tidak lagi berjalan dengan baik. Mereka (birokrasi pemerintahan) menjadi bengkak, boros dan tidak efektif. Dan ketika dunia mulai berubah, mereka gagal menyesuaikan diri dengan perubahan itu sama sekali tidak berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan perekonomian tahun 1990-an yang cepat berubah, kaya informasi dan padat pengetahuan”.

Perubahan birokrasi publik yang diperkenalkan para teorisi tersebut merupakan perubahan birokrasi publik melalui pendekatan NPM (New Public Management) sebagai paradigma baru dalam upaya ‘mentransformasi birokrasi yang kaku, hirarkis, pejabatis bentuk adminisitrasi publiknya menjadi suatu birokrasi yang fleksibel dan berorientasi pasar - pengguna jasa / pelanggan- bentuk manajemen publiknya’ (Hughes,1994,1).

Pendekatan NPM (New Public Management) bila ditarik benang merahnya (Osborne dan Gaebler, 1992) menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria *Good Governance* dan *Enterpreneurial Government* dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Enterpreneurial Government* itu sendiri.

Mencermati banyaknya ide, konsep, pendekatan dan paradigma baru tentang reformasi birokrasi maupun penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan yang telah dikemukakan para ahli, tetapi sangat jarang diikuti dengan kajian kritis mengenai perilaku, sikap dan persepsi elit birokrasi yang melaksanakan reformasi tersebut. Memang diakui telah terjadi perkembangan diskursus (wacana) mengenai *Good Governance* dan *Enterpreneurial Government* dan menjadi perdebatan oleh banyak kalangan, baik para politisi, kalangan

akademisi, praktisi pemerintahan maupun masyarakat dengan persepsi dan argumen yang berbeda-beda. Seharusnya elit birokrasi menyikapinya dengan kritis dan konstruktif serta mengadakan reformasi terlebih dahulu terhadap perilaku, *mind set* maupun budaya serta kompetensi yang harus dimilikinya dalam merespon tuntutan dan dinamika perubahan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan berupaya memahami, menggambarkan dan melukiskan persepsi dari pejabat struktural pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam menerima dan memahami ide *Enterpreneurial Government* serta mengetahui faktor-faktor yang menjelaskan persepsi pejabat tersebut terhadap ide *Enterpreneurial Government*.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada pejabat-pejabat dan pegawai yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, setelah itu data di kumpulkan oleh peneliti untuk di analisis dan di tuangkan dalam hasil penulisan apa saja yang di peroleh dari penelitian di lapangan. Peneliti meminta data pada instansi yang terkait berupa dokumen-dokumen atau data-data sekunder lainnya yang di butuhkan oleh peneliti dalam rangka memperkuat data yang di peroleh secara primer.

Populasi dan Sampel

Peneliti mengambil populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan sejumlah 846 buah jabatan struktural dengan komposisi Eselon II 25 orang; Eselon II 154 orang; Eselon IV 667 orang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 50 orang. Untuk menentukan sampel tersebut penulis menggunakan teknik *stratified random sampling*

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan gabungan antara metode kuantitatif sederhana dan metode kualitatif. Data yang ada kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi dan persentase untuk masing-masing aspek penilaian beserta indikator pengukurannya dan dilakukan analisis persentase. Kemudian metode kualitatif digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap data yang ada. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut Mengoreksi instrumen yang telah diisi serta meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran hasil jawaban atau pernyataan responden sehingga dapat

diperoleh data yang valid dan sesuai; Memberikan nilai atau skor berupa angka untuk setiap jawaban yang diberikan sehingga menghasilkan data kuantitatif dan nilai persentasenya. Penilaian atas jawaban yang diberikan untuk menghasilkan skor tertentu digunakan model skala *likert* dengan bentuk favorable secara descending atau bertingkat dimulai dari skor tertinggi atau jawaban sangat setuju diberi nilai 5 dan skor jawaban terendah atau jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1.; Membuat tabulasi data, yakni data yang diperoleh dari hasil penilaian responden beserta indikatornya. Pengukurannya dibuat tabel frekwensi dan persentase yang kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai persentase rata-rata dari jawaban responden terhadap aspek yang diukur. Deskripsi hasil distribusi frekwensi dan persentase untuk setiap aspek pengukuran kemudian diinterpretasikan secara kualitatif melalui analisis persentase. Ukuran penilaian dilihat dari jumlah persentase terbesar untuk setiap aspek, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai persentase jawaban responden maka semakin baik pula penilaian responden terhadap ide *entrepreneurial government*. Pembuktian hasil jawaban dari kuesioner tersebut dilakukan dengan cara pengecekan kebenaran ulang (*cross check*) dengan hasil wawancara dengan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pejabat Birokrasi Kabupaten Sorong Selatan Terhadap Ide Enterpreneurial Government

Aspek Costumer Oriented

Berikut ini wawancara penulis dengan salah seorang pejabat eselon IV di Bappeda :
“Kalaulah *citizen carter* itu dibuat dan dilaksanakan masyarakat kita belum siap, bisa-bisa mereka akan berdemo terus kekantor supaya urusan mereka bisa cepat selesai. Dan saya juga melihat pegawai kita disini banyak yang tidak mengerti dan juga tidak siap dengan adanya perubahan serta perlu diadakannya sosialisasi jauh-jauh hari. Kemudian lagi, takutnya itu hanya slogan-slogan kosong yang memperparah pelayanan pada masyarakat, ya hanya lip servislah.” (11 september 2014)

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa masih ada keragu-raguan dan ketidakmertian dari pegawai tentang *citizen carter* itu sesungguhnya. Selain itu mereka masih menganggap masyarakat belum siap dan tidak dewasa dalam menyikapi perubahan dalam hal pelayanan publik. Kejelasan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia jasa yang terdapat dalam sebuah *citizen carter* menyebabkan banyak orang ragu untuk mengaplikasikan konsep tersebut karena ada konsekuensi didalamnya. Dari hasil kuesioner dan wawancara dapat disimpulkan sebagian besar responden belum mengerti dan paham betul dengan konsep dan penerapan *citizen carter* .

Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, berikut ini wawancara penulis dengan salah satu pejabat eselon IV di Bappeda sebagai refleksi dari kesimpulan diatas: “Wah, saya tak paham betul mengenai program *customer choice* ini karena saya bekerja tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Kalau boleh saya berpendapat, masa reformasi yang penuh dengan kebebasan ini membuat masyarakat menjadi kuat tetapi kuatnya masyarakat bukan malah bagus malah tambah kacau dan banyak demo-demo disana sini, kejahatanpun meningkat. Nah, kalau masyarakat diberikan lagi kebebasan dalam hal pelayanan itu akan membuat mereka semakin manja dan pemerintah akan semakin kwalahan. Jadi menurut saya kita pemerintah dan masyarakat itu sendiri belum siap untuk hal-hal yang seperti itu, apalagi mengadakan sebuah perubahan, susahlah banyak makan korban belum lagi yang pro status quo.” (11 september 2014)

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa pejabat pemda banyak yang belum mengerti dan memahami tentang adanya program pilihan pelanggan (masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. *Customer choice* atau pilihan pelanggan memberikan kemudahan pada pengguna jasa dalam memilih penyedia jasa sesuai dengan karakteristik aspirasi yang dimilikinya. Untuk itulah pemerintah harus mendorong sebanyak mungkin munculnya *providers* (penyedia jasa), membangun insentif dan memperbanyak fasilitas khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan serta mempermudah *market entry* bagi masyarakat luas.

Selanjutnya pemerintah memberikan informasi mengenai masing-masing *providers* pelayanan kepada masyarakat tentang pelayanannya, biayanya, kualitas layanannya dan waktunya sehingga tidak terjadi *gap* informasi dan masyarakat mengetahui serta bisa memilih *providers* yang cocok dengan kondisinya. Hal lain juga bisa dilakukan dengan mengembangkan *Quality Assurance* (standar pelayanan minimal) dengan mengembangkan *complain* terhadap pelayanan yang kurang baik dengan membentuk badan *ombusman* yang berfungsi sebagai wasit. Ungkapan dari Ketua Bappeda berikut setidaknya tidaknya merefleksikan persepsi tersebut : “Oh iya itu ide bagus yang dilontarkan oleh Osborne dalam bukunya, saya pun membayangkan waktu saya mendapatkannya diperkuliahan, kalau ide itu bisa diterapkan dalam pelayanan publik tentu saja sedikit banyaknya akan membawa perubahan kearah yang lebih baik. Banyak keuntungan yang kita dapat kalau kita bisa melakukannya pertama masyarakat bebas memilih penyedia jasanya, kompetisi antar *providers* terjadi sehingga masyarakat diuntungkan sebab *providers* yang mahal dan kualitas pelayanannya jelek akan ditinggalkan masyarakat, selanjutnya masyarakat tahu informasi

tentang providers dan product yang dihasilkannya. Saya sependapat bila itu perlu dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.” (12 September 2014)

Keterlibatan pihak swasta dan NGO dalam melakukan pelayanan publik dalam rangka efektifitas dan efisiensinya sebuah pelayanan. Ketika pelayanan itu lebih baik dilakukan oleh pihak swasta atau NGO maka itu harus dilepas oleh pemerintah dan begitu juga sebaliknya. Dalam *good governance* ada tiga unsur yang menopang jalannya sebuah *governance* selain pemerintah ada pihak swasta dan civil society. Ketiga komponen inilah yang harus disinergikan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Pembagian peran antar ketiga komponen ini dimungkinkan selama bermuara pada kepentingan publik secara luas. Begitu juga dalam hal pelayanan publik merupakan tanggungjawab ketiga komponen ini untuk melakukannya. Pemerintah hanya berfungsi ketika terjadi kegagalan pasar maupun kegagalan civil society. Ungkapan seorang pejabat eselon III di Setdakab berikut dapat merefleksikan pemahaman tentang masalah tersebut. “Betul, sekarang zamannya sudah berubah, kalau pada masa awal-awal merdeka ataupun awal orde baru pemerintahlah yang menangani semua urusan masyarakat sampai kehal-hal yang *tetek bengek* (hal-hal kecil), tapi sekarang dengan pembangunan selama ini masyarakat semakin pintar dan ingin ikut ambil bagian dalam urusan-urusan publik, tak ketinggalan pihak swasta, apalagi kita mendengar perlunya penerapan *good governance*, ditambah lagi beban pemerintah semakin berat kalau semua urusan ditanganinya sendiri. Kitakan merasakan hampir semua urusan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sangat mengecewakan dan memprihatinkan, pokoknya asal jadi saja. Disinilah saya rasa perlunya pihak lain yang menyediakan jasa pelayanan. Memang masalahnya sangat kompleks dan perlu perubahan yang mendasar” (12 september 2014).

Masalah pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu misi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikemukakan oleh kepala dinas PMD dibawah ini “Program pemberdayaan masyarakat telah menjadi misi utama kabupaten, kita pemerintah daerah terus mendorong kearah sana apalagi kitapun telah membentuk dinas pemberdayaan masyarakat desa. Sasarannya sangat jelas bahwa masyarakat kita yang didesa sangat tertinggal dan perlu diberdayakan. Banyak program-program dan pelatihan-pelatihan yang telah kita lakukan untuk masyarakat dalam rangka pemberdayaan” (12 september 2014).

Aspek Efisiensi Anggaran

Anggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu ide baru dalam pemerintahan di Indonesia karena selama ini tidak dikenal. Kenyataan ini menjadikan banyaknya aparat

pemerintah yang tidak tahu dan mengerti tentang hal ini. Sebagian ada yang mengetahui karena tuntutan dari Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.105 dan 108 Tahun 2000 tetapi tidak mampu dan tidak mau untuk menerapkannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Dilihat dari observasi dilapangan bahwa sistem anggaran selama ini mengandung ketidakefisienan yang banyak menguntungkan aparat sehingga perubahan sulit untuk dilakukan. Hal tersebut seperti dikatakan oleh salah seorang pejabat eselon IV di bagian pemerintahan Setdakab,

“Kita dikabupaten ini kurang mengerti dengan anggaran yang berbasis kinerja, hanya dengar sepintas lalu saja. Apalagi yang menangani anggaran kan bagian keuangan sehingga kami dibagian lain ataupun instansi lain banyak yang tak tahu” (13 september 2014).

Selanjutnya salah seorang pejabat eselon III disetdakab mengungkapkan hal yang sama :

“Anggaran yang berbasis kinerja untuk saat sekarang masih sulit untuk diterapkan karena banyak aparat yang tidak tahu dan butuh waktu yang cukup untuk sosialisasi, dan bagi yang tahu pura-pura tak tahu karena sistem ini menurut mereka akan membuatnya tidak bisa lagi untuk memainkan anggaran untuk kepentingan pribadi” (13 september 2014).

Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, berikut ini wawancara penulis dengan salah satu pejabat eselon II di Setdakab sebagai refleksi dari kesimpulan diatas:

“Tujuan utama dari adanya anggaran pemerintah yang didasarkan pada kinerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran karena selama ini kita tahu penyusunan anggaran lebih banyak untuk kepentingan kelompok tertentu bahkan kepentingan pribadi para pengambil kebijakan, apalagi pada masa orde baru. Dengan adanya momentum reformasi dan otonomi daerah inilah kita perlu berpikir ulang untuk lebih efisien dalam anggaran kalau ini tidak dilakukan segera mungkin saya yakin kita akan mengalami krisis yang susah untuk bangkit lagi” (13 september 2014).

Kemudian salah seorang pejabat eselon IV di Setdakab mengungkap hal yang agak bertolak belakang dengan ungkapan diatas,

“Saya kurang yakin kalau anggaran yang didasarkan pada kinerja ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi KKN, ini bukan berarti saya pesimis tapi kita punya banyak pengalaman kalau aparat kita paling pandai dalam mengelabui suatu aturan buat keuntungan pribadinya, pengetahuan saja tidak menjamin apalagi tak punya pengetahuan yang paling penting mental aparat perlu dibenahi dulu” (13 september 2014).

Dari pernyataan tersebut terlihat adanya pemahaman yang berbeda antara para pejabat terhadap anggaran pemerintah yang didasarkan pada kinerja. Perbedaan pemahaman ini

dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya pengalaman masa lalu dan pendidikan yang pernah diikuti seseorang.

Anggapan ini didasarkan bahwa apabila hal ini dilakukan banyak pejabat yang tidak siap karena mereka belum terbiasa dan banyak yang berpandangan negatif dengan ide ini. Pandangan seorang pejabat eselon IV di Setdakab setidaknya-tidaknya merefleksikan persepsi tersebut.

“Saya saja belum paham mengenai kinerja anggaran ini, dan saya yakin kebanyakan dari pegawai banyak yang tidak mengetahui, apa itu kinerja anggaran? bagaimana penerapannya? Sepintas dengar memang bagus katanya bila diterapkan, tapi penerapannya kan tak segampang ngomongnya, apalagi hal ini sesuatu yang baru dimana aparat pemerintah tidak biasa melakukan suatu perubahan ditambah lagi bila berhubungan dengan kepentingannya” (13 september 2014).

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan kebanyakan pejabat yang mempunyai eselon II dan III saja yang cukup menerima dan memahami dengan baik ide-ide yang ditawarkan dalam *Entrepreneurial Government*, sedangkan kebanyakan dari pejabat eselon IV kurang memahami dan terkesan asing serta mempunyai pandangan yang negatif dan pesimis terhadap penerapan ide-ide *Entrepreneurial Government* tersebut. Hal ini juga terlihat dari pernyataan salah seorang pejabat eselon IV di Setdakab yang penulis temui; “Saya tak begitu ngerti dengan anggaran berbasis kinerja, terus terang saja saya belum pernah belajar anyo dengar-dengar kalau orang sedang sibuk membicarakan yang namanya kinerja, Saya beranggapan mungkin idenya bagus tapi menurut saya sangat susah untuk diterapkan bila pegawainya masih kayak gini, ‘*masih doyan maling*’ walau tak semua pegawai tapi umumnya, ya kayak gitulah” (13 september 2014).

Dari hasil observasi dilapangan, banyaknya responden yang setuju dengan pernyataan tersebut seiring dengan berjalannya era otonomi daerah yang lebih mengedepankan, merespon dan mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dimaksudkan agar terlihat wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap dana masyarakat yang dikelolanya. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah pejabat eselon II, “Saya paling setuju jika diterapkan anggaran yang berbasis kinerja dan kita pemda sedang mengarah kesana, ini kan tuntutan otonomi daerah, Cuma perlu waktu dan tahapan proses, banyak yang harus kita benahi sebelum menuju kesana, terutama sekali mental aparatur. Banyak keuntungan yang kita dapat diantaranya efisiensi anggaran, adanya transparansi dan akuntabilitas baik pada lembaga yang berwenang terhadap pengawasan maupun pada masyarakat, karena apa? kegiatan

perencanaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga komponen yaitu pemerintah, DPRD dan Masyarakat” (14 september 2014). Dari data dan keterangan responden serta hasil observasi dilapangan terlihat bahwa sebagian besar pejabat sudah mengetahui sedikit banyaknya mengenai anggaran yang berbasis kinerja. Tetapi banyak juga yang tidak mengetahui apalagi untuk menerapkannya, dikarenakan berbagai hal terutama yang menyangkut dengan komplik kepentingan.

Aspek Inovasi dan Kreatifitas

Inovasi dan kreatifitas merupakan salah satu hal yang utama dalam pemerintahan yang bergaya wirausaha. Inovasi dan kreatifitas dapat dijadikan barometer sebuah pemerintahan yang terus mencari format dan bentuk yang tepat dalam merespon perubahan dinamika yang begitu cepat terjadi dalam masyarakatnya. Untuk itulah pejabat pemerintah perlu melakukan inovasi diberbagai aspek pemerintahannya. Berikut ini dalam tabel V.7 akan disajikan data jawaban responden terhadap beberapa ide inovasi dan kreatifitas dalam pemerintahan yang bergaya wirausaha

Berikut ini wawancara penulis dengan salah seorang pejabat eselon IV di Bappeda:

“Jika pemerintah melakukan kemitraan dengan swasta dalam hal pelayanan publik takutnya nanti malah swasta yang berkembang dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa kan susah jadinya.” (14 september 2014).

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pejabat eselon III disalah satu dinas,

“Berita di koran dan televisi telah banyak membahas tentang privatisasi yang dilakukan pemerintah dengan swasta, aset-aset negara kita jual murah tapi apa hasilnya buat perbaikan ekonomi, toh dollar naik juga, minyak naik, harga barang-barang melambung, pengangguran tambah banyak, pokoknya saya tak yakin dengan program kemitraan ini” (14 september 2014).

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa masih terdapat kesalahan pandangan dalam melihat dan memahami ide kemitraan dan ketidakmengertian dari pejabat tentang kemitraan itu sesungguhnya. Selain itu mereka masih menganggap pihak swasta tidak bisa diajak bekerjasama dengan pemerintah karena swasta punya misi mencari keuntungan, berbeda dengan pemerintah. Dari hasil kuesioner dan wawancara dapat disimpulkan sebagian besar responden belum mengerti dan paham betul dengan konsep dan penerapan kemitraan ini.

Pembatasan berlakunya sebuah aturan sebenarnya dimaksudkan agar peraturan-peraturan yang tidak lagi mampu merespon dinamika perubahan yang terjadi dimasyarakat agar secepatnya dirubah atau ditinjau lagi keberadaannya, sehingga aturan tidak lagi menjadi

penghambat kemajuan tetapi mendorong adanya perbaikan terutama sekali dalam hal pelayanan publik. Bagi pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah hal-hal yang demikian belum terbiasa untuk dilakukan. Perubahan baru dilakukan bila ada sebuah momentum atau desakan yang kuat dari masyarakat seperti adanya reformasi.

Pemerintah menganggap merubah aturan akan merusak sebuah sistem yang sudah mapan, dan setiap perubahan menelan biaya yang mahal baik sosial, ekonomi maupun biaya politiknya. Berkenaan dengan kesimpulan tersebut, berikut ini wawancara penulis dengan salah satu pejabat eselon IV di bagian hukum Setdakab sebagai refleksi dari kesimpulan diatas: “Susah bagi kita untuk mengganti aturan-aturan yang sudah ada walau terkadang aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi zaman, apalagi sampai melibatkan DPRD untuk merubah sebuah Perda tentu biayanya tidak sedikit, dan selanjutnya aturan yang sudah ada saja masih banyak yang belum diikuti, budaya taat pada aturan belum ada dalam masyarakat kita, Mungkin ini sebuah lompatan yang terlalu maju buat pemerintahan kita dan kita perlu lebih banyak belajar untuk dapat menerapkannya” (16 september 2014)

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa pejabat banyak yang enggan untuk mengadakan perubahan apalagi sampai merubah sebuah aturan, karena aturan-aturan yang ada dianggap sakral dan tidak perlu diubah kecuali ada tekanan yang besar dari masyarakat. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pejabat birokrasi masih banyak yang belum mengetahui dan memahami adanya ide *sunset law* dengan baik, hanya dengar sepintas lalu dan sepotong-sepotong. Selanjutnya selain adanya *sunset law* dalam pemerintahan yang bergaya wirausaha juga dikembangkan inovasi tentang perlunya komisi peninjauan terhadap aturan-aturan yang berlaku (*review commissions*). Hal ini dimaksudkan untuk meneliti apakah aturan-aturan tersebut masih sesuai dan mampu merespon perubahan dinamika tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Ide perlunya setiap pemerintah daerah mempunyai rencana strategis dalam perencanaan pembangunannya menggantikan model Repelita gaya orde baru mulai dilaksanakan sejak berlakunya otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar dalam perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat yang berkepentingan didalamnya (*stakeholder*) yang selama ini tidak dilibatkan. Kebijakan selama ini selalu menggunakan pendekatan dari atas kebawah (*top down*). Untuk itu perlu dikembangkan strategi perencanaan pembangunan dengan pendekatan dari bawah keatas (*bottom up*) sehingga masyarakat benar-benar terlibat dan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersifat strategis.

Berikut ini wawancara penulis dengan beberapa pejabat di Bappeda mengenai pandangannya mengenai perlunya pemerintah daerah/kota mempunyai rencana strategis dalam pengembangan daerah/kotanya. “Saya sangat terlibat dalam pembuatan renstra ini karena saya bekerja di Bappeda, rencana strategis memang sangat bagus bila diterapkan karena langsung melibatkan masyarakat didalamnya, dan ini juga merupakan tuntutan dari pusat untuk dilaksanakan oleh setiap daerah. Cuma sayang sebagian masyarakat kita apatis dan terserah pada pemerintah daerah saja, mereka beranggapan renstra ini tak lebih dari sekedar Rakorbang yang hanya mendengar aspirasi masyarakat tanpa pernah mewujudkannya, Sebagian dari aparat pempadapun banyak yang tidak paham dan mengerti dengan cara kerja renstra ini. Akibatnya ya sama saja renstra dibuat berdasarkan maunya mereka.” (18 september 2014).

“Sejak otonomi ini banyak kali hal-hal yang baru, mulai dari DPRD yang sangat berkuasa, LPJ Bupati yang membuat kita pegawai tak tidur-tidur mengerjakannya, belum lagi katanya anggaran berbasis kinerja ditambah lagi dengan wajibnya renstra bagi kabupaten dan banyak lagi yang lain, itu semua membuat kita-kita dibawah ini jadi bingung, kita tak pernah tahu dan belajar itu semua, sosialisasinya pun setengah-setengah hati, jadi wajar banyak yang tak tahu menahu mengenai hal itu semua” (18 september 2014).

Dari hasil observasi dilapangan, banyaknya responden yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut dikarenakan SOP (standar Operasional Prosedur) baru yang telah disusun menyebabkan mereka pindah dari jabatan bahkan kehilangan jabatan yang selama ini mereka pegang. Penyusunan SOP baru tersebut sebenarnya seiring dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang besar pada daerah. Akibatnya daerah perlu menyesuaikan organisasinya sesuai dengan kebutuhan daerah. Konsekuensinya banyak organisasi pemda yang dihapus, digabung bahkan ada pembentukan organisasi baru. Namun tidak sedikit dari pegawai yang setuju dengan adanya SOP baru ini karena mereka mendapat peluang untuk meningkatkan karier maupun sumber penghasilan mereka. Semua perubahan ini membawa implikasi terhadap nasib pegawai pemda. Berikut hasil wawancara Ketua BKD yang dapat menjelaskan sikapnya terhadap hal ini, “Kita di Sorong Selatan telah memberlakukan SOP baru, Terjadinya pro kontra merupakan hal biasa, *like and dislike* tetapi itu semua dilakukan dalam rangka perbaikan dan pembenahan organisasi pemda dalam menghadapi otonomi daerah, pemda dituntut untuk seefisien mungkin dan organisasi yang ada mampu merespon perubahan yang terjadi.” (18 september 2014).

Selanjutnya penulis juga mengadakan wawancara kepada pejabat yang tidak diuntungkan dengan SOP baru ini, “SOP yang baru ini membuat pegawai bingung karena banyak yang kehilangan jabatan dan sumber penghasilan, lihatlah banyak pejabat yang nyogok untuk sebuah jabatan, SOP ini mungkin niatnya baik tapi nasib pegawai dan pertimbangan kemanusiaan perlu dipikirkan agar SOP ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kabupaten tanpa melupakan pegawai. Apa menjamin dengan SOP yang baru menyebabkan pemda lebih efisien dan responsive? kan tidak semudah itu, jadi perlu kematangan dan pengetahuan yang cukup sebelum hal ini dilakukan” (18 september 2014).

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pejabat dan observasi dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa disamakan dengan pihak swasta karena misinya berbeda dengan pemerintah, selanjutnya aparat pemerintah banyak yang tidak mempunyai kemampuan wirausaha dan terakhir banyak usaha-usaha yang dijalankan pemerintah rugi, kebocoran dimana-dimana, ditambah lagi efisiensi jauh dari yang diharapkan seperti perusahaan-perusahaan milik pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Hal ini terungkap dari beberapa hasil wawancara dengan salah satu Kasubbag di Setdakab berikut ini, “Susah bila pemerintah berpikir untuk cari untung, disamping aparatnya yang tidak punya kemampuan, juga sistem birokrasi kita tidak mendukung untuk itu, tengoklah usaha-usaha yang dijalankan pemerintah jarang yang berhasil jangankan untng malah rugi, tidak efisien dan banyak pemborosan, ada istilah pinter goblok gaji tetap sama. Jadi susah bila itu mau diterapkan” (21 september 2014).

“Menurut saya memang sudah saatnya pemerintah berpikir untuk mencari sumber pendapatan baru, apalagi dengan otonomi daerah ini mau tidak mau suka tidak suka kalau mau jalan suatu pemerintah daerah ia harus punya sumber pendapatan yang besar.kita diSorong Selatan terbantu oleh dana perimbangan minyak jika ini tidak ada, kitapun sama tahu Sorong Selatan menjadi hanyut bila kita tidak punya pemikiran mencari sumber pendapatan alternatif selain dana perimbangan.” (21 september 2014). Begitulah adanya pemahaman dan pengertian yang beragam dari setiap responden mengenai setiap pernyataan yang ada dengan alasan yang berbeda pula, Setiap orang punya alasan tersendiri untuk menjawab setuju ataupun tidak setuju. Itulah gambaran umum jawaban responden terhadap aspek *profit oriented* yang dikembangkan pemerintah dengan alasannya setuju dan ketidaksetujuan mereka.

Aspek Kompetitif dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Berikut ini wawancara penulis dengan salah seorang pejabat eselon IV di Dinas Kesehatan:

“Kalau kompetisi sebenarnya bagus tapi kadang-kadang pemerintah kita malahan tak mampu untuk berkompetisi apalagi dengan swasta, lihatlah pelayanan yang dikelola oleh swasta seperti rumah sakit dan sekolah-sekolah kita lihat swasta lebih berkembang dari yang dikelola oleh pemerintah yang mendapat subsidi.” (23 september 2014).

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pejabat eselon III di Dinas Kesehatan,

“Benar dek, itulah masalah pemerintah yang kita hadapi sekarang, bagaimana nilai kompetisi ini terus dikembangkan dalam rangka memperbaiki kualitas layanan kepada publik, swasta memang perlu diikutkan sehingga ada rasa tanggung jawab dari mereka. Kedepan nanti orang akan memilih dan mencari kualitas yang baik dari jasa yang mereka butuhkan, kompetisi yang sehat inilah salah satunya yang akan menyebabkan para penyedia jasa berlomba-lomba meningkatkan kualitas layanannya ” (23 september 2014).

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa pandangan pejabat pemerintah daerah pada dasarnya setuju dengan pengembangan nilai-nilai kompetisi tetapi penerapannya masih banyak berbenturan dengan sistem yang tidak kondusif. Pandangan negative atau pesimis juga melingkupi pemikiran pejabat pemda karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan kompetisi yang sehat antar penyedia jasa layanan publik.

Pemerintah dikenal sangat monopolistik dalam menyelenggarakan urusan pelayanan publik, akibatnya terjadi inefisiensi, kelambanan dan buruknya kualitas pelayanan. Untuk itu pemerintah harus mampu merangsang, mendorong dan menciptakan sistem kompetisi antar berbagai pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompetisi harus dipahami sebagai kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah dalam melakukan perbaikan. Kompetisi mempunyai beberapa keuntungan; pertama, terjadi efisiensi yang lebih besar; kedua, memaksa monopoli pemerintah atau swasta untuk merespon segala kebutuhan masyarakatnya; ketiga, kompetisi menghargai inovasi dan keempat, kompetisi membangkitkan harga diri dan semangat juang pejabat. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pejabat eselon Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai refleksi dari kesimpulan diatas:

“Kompetisi yang sehat salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan kualitas pelayanan kearah yang lebih baik, membangkitkan inovasi dan kreatifitas seperti diadakannya tender dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah sehingga akan diperoleh penawaran yang wajar dengan hasil yang tentunya juga baik dan berkualitas, tetapi kongkalikong antar kontraktor terjadi sehingga maksud dari kompetisi yang sehat tidak dapat berjalan dengan baik” (24 september 2014)

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa pejabat pemda pada prinsipnya setuju dengan pengembangan prinsip dan semangat kompetisi dalam hal pelayanan publik. Hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan bahwa adanya kompetisi dalam hal pelayanan publik belum terlihat seperti sekolah-sekolah swasta di daerah kurang maju karena kurangnya dana dan sarana prasarana dibandingkan dengan sekolah pemerintah yang mendapat subsidi dari pemda. Kompetisi selalu dimenangkan oleh yang kuat dan punya akses terhadap kekuasaan. Sangat jarang terjadi sebuah kompetisi yang sehat dan fair selalu ada bias. Dalam hal proyek pemerintah pengadaan barang dan jasa, tender yang menjunjung nilai dan semangat kompetisi yang sehat tidak jalan tetapi pemerintah telah menunjuk siapa pemenangnya sebelum proses tender dilaksanakan. Berikut wawancara penulis dengan pejabat eselon IV di Bag. Perlengkapan yang menggambarkan hal tersebut, “Sangat sulit menerapkan kompetisi yang sehat , lihatlah Keppres18 2000 mensyaratkan aturan tender dan pelelangan dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan ketentuan yang ada, maksudnya baik, tapi apa? banyak pesanan bos-bos supaya yang inilah yang menang walupun tidak layak karena ada kongkalikong dengan kontraktor tersebut, saya tidak setuju ya karena inilah, hanya sekedar buat omongan dan bukan untuk dilaksanakan” (25 september 2014).

Pengguna jasa akan memilih penyedia jasa yang memberikan pelayanan yang berkualitas disinilah letaknya para providers berkompetisi untuk menarik pengguna jasa dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan biaya yang semurah. Disamping itu juga sistem insentif yang diberikan kepada para aparat pelayanan akan mendorong mereka berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan oleh pengguna jasa, karena jika tidak mereka tidak mendapatkan insentif dari pekerjaannya. Bila ini berjalan dengan baik tentunya ada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

Kompetisi sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar dalam globalisasi dunia saat ini. Jika pemerintah tidak mampu mendorong nilai-nilai kompetisi kedalam ruang publik maka globalisasi dengan pasar bebasnya akan menjadi mimpi buruk bagi kita. Ketika pelayanan publik kita buruk dengan kualitas yang rendah tentu saja para investor atau pihak swasta enggan untuk menanamkan modalnya dinegeri ini, karena lebih baik mereka menanamkan modalnya kenegara yang kualitas pelayanan publiknya baik dan tidak terlalu birokratis. Seperti yang diungkap oleh salah satu pejabat eselon II di Setda: “Kompetitif dan daya saing, itulah ungkapan yang sering kita dengar, memang saat ini hal itu tak dapat ditawar-tawar lagi jika kita tidak kompetitif kita akan ketinggalan, Saya agak pesimis dengan kesiapan kita menghadapi pasar bebas, mulai dari sektor swasta, masyarakat sampai birokrasi kita belum

siap untuk berkompetisi dipasar bebas. Dibidang pelayanan publik kita tertinggal jauh dari singapura dan Malaysia. Banyak cerita kita dengar bagaimana buruknya kualitas pelayanan publik dinegeri kita ini. Mungkin saja dengan membangun kompetisi antar penyedia jasa layanan dan pemberian insentif kepada petugas akan sedikit mendongkrak kualitas pelayanan yang diberikan dan sedikit banyaknya berpengaruh bagi daya saing kita dalam menghadapi pasar bebas karena antar birokrasi juga terjadi persaingan” (26 september 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandangan dan pemahaman pejabat pemda dalam memahami ide kompetisi dalam hal pelayanan publik cukup baik walupun masih ada sebagian kecil yang menolak adanya ide tersebut.

Faktor-Faktor Yang Menjelaskan Entrepreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat Birokrasi.

Aspek Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Entrepreneurial Government

Berikut ini wawancara penulis dengan beberapa pejabat eselon IV di BKD yang menggambarkan kesimpulan tersebut: “Saya tak tahu apa itu *Entrepreneurial Government*, memang pernah dengar tapi ya tadi hanya sekilas-sekilas saja, kadang dengar di TV atau baca koran jadi saya tak paham betul mengenai itu apalagi saya cuma tamat SLTA” (28 september 2014). “Saya memang pernah dengar tentang pemerintahan yang bergaya wirausaha dari Osborne katanya, tapi saya tak paham betul mengenai hal itu, waktu saya kuliah dulu tak ada belajar mengenai itu, apalagi hal inikan baru ” (28 september 2014).

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar pejabat pemda belum memahami dengan baik mengenai konsep *Entrepreneurial Government*. Hal ini dikarenakan mereka belum pernah mempelajarinya atau mendapat penjelasan tentang hal itu. Untuk pejabat eselon II dan eselon III hampir semuanya tahu dan pernah belajar baik di perguruan tinggi maupun didiklat penjenjangan yang pernah diikuti. Seperti wawancara penulis dengan salah seorang pejabat eselon III di Bappeda. “Masalah pemerintahan yang bergaya wirausaha secara konsep saya sudah tahu tapi kan tak mudah untuk diterapkan, waktu saya spama juga diajarkan mengenai hal itu, kemudian waktu saya kuliah S-2 di UGM juga diajarkan” (30 september 2014).

Penyesuai dengan konteks birokrasi di Indonesia dalam penerapan konsep ini dikarenakan konsep ini berasal dari barat yang tentu saja budayanya berbeda. Dengan catatan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep tersebut tetap menjadi perhatian dalam penerapannya. Strategi yang dikembangkan juga perlu disesuaikan dengan permasalahan birokrasi yang dihadapi sehingga sifatnya sangat situasional. Hal ini terungkap dari hasil

wawancara penulis dengan salah satu pejabat eselon II di Setdakab: “Kita dalam penerapannya memang perlu modifikasi sesuai konteks yang kita hadapi, tentu saja berbeda antara kita dengan negara-negara barat, aspek budaya juga menjadi bahan pertimbangan penting bila kita hendak menerapkan konsep tersebut dan banyak aspek lainnya, tapi yang jelas prinsip-prinsipnya tidak boleh ditinggalkan” (30 september 2014).

Aspek Kompetensi

Berikut ini wawancara penulis dengan pejabat eselon IV di Bappeda yang menggambarkan kesimpulan tersebut: “Menurut saya sudah sewajarnya seorang pejabat harus cakap, terampil dan berpengetahuan tapi masalahnya kan bukan, siapa yang kenal dan punya hubungan dengan orang yang berwenang baru bisa duduk disebuah jabatan, ya KKN lah atau perkoncoan, kalau kita tak ada hubungan susahlah mau dapat jabatan kecuali nasib baik. Untuk saat sekarang pertimbangannya bukan kompetensi tapi kedekatan dengan penguasa”(1 Oktober 2014). “Makanya banyak pejabat yang tidak punya kompetensi dalam sebuah jabatan akibat perkoncoan tadi, akibatnya apa? mereka tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk mengadakan suatu perubahan tapi malah terus menjilat keatas tempat dia bergantung”. (1 Oktober 2014). Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar pejabat pemda setuju adanya kompetensi dalam memegang sebuah jabatan, tetapi sistem perkoncoan merupakan sesuatu hal yang taidak bisa dihilangkan. Akibatnya tidak lagi memperhatikan kompetensi, pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam memangku jabatan.

Aspek Sosialisasi Dari Prinsip Entrepreneurial Government

Berikut ini wawancara penulis dengan salah seorang pejabat eselon IV di Bappeda : “Saya tak pernah ikut-ikut seminar, symposium, lokakarya yang membahas tentang pemerintahan yang bergaya wirausaha, palingan hanya dengar-dengar kalau itu idenya Osborne, itupun dari pidato atau saya baca artikel dikoran. Wajar saja kalau saya tak paham dan belum ngerti dengan hal itu.” (1 Oktober 2014) “Kami yang duduk di eselon IV ini jarang ikut-ikut seminar atau lokakarya apalagi acara-acaranya yang dijakarta, itu hanya buat eselon II atau sekali-kali eselon III, jadi terus terang saja kami banyak tak tahu tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi, palingan hanya sekedar tahu dikit-dikit saja. (1 Oktober 2014).

Dari ungkapan tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa untuk pejabat rendahan jarang sekali diberi kesempatan untuk mengikuti seminar ataupun lokakarya sehingga sudah sewajarnya kalau pengetahuannya tidak bertambah apalagi kalau tidak ada kemauan untuk mengembangkan diri sendiri. Berikut hasil wawancara penulis dengan

beberapa pejabat eselon IV, III dan Eselon II di BKD, “Untuk eselon IV kami ikut penjenjangan adumla, disana belum diajarkan dengan konsep *Entrepreneurial Government* jadi kami tak paham betul dengan itu semua” (2 Oktober 2014). “O ya Diklat Spama yang pernah saya ikuti memang mengajarkan tentang pemerintahan yang bergaya wirausaha, tapi memang berat bila ingin dipraktekkan kedalam birokrasi”. (2 Oktober 2014). “Waktu saya spama juga telah dikenalkan tentang konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha kemudian belum lama ini saya ikut spamen mulai dikembangkan adanya ide *Electronic Government* dengan penggunaan teknologi internet”. (2 Oktober 2014)

Terlihat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa Diklat Struktural yang diikuti oleh pejabat pemda mulai dari Adum sampai Spati mengajarkan pelajaran yang berbeda. Konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha diajarkan pada diklat penjenjangan spama. Banyaknya responden yang tidak pernah mendapat pelajaran tentang hal ini dikarenakan sebagian besar responden duduk pada eselon IV dan formasi jabatan yang paling banyak dipemda adalah untuk eselon IV. Inilah kondisi riil yang dihadapi oleh umumnya pegawai, ditambah lagi tidak semua pegawai selalu mempunyai komitmen untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Tidak ada budaya belajar dalam birokrasi kita terutama bagi pegawainya.

Dari ungkapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketidaktahuan responden terhadap konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha lebih dikarenakan mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang itu terutama sekali pada saat mereka kuliah. Pendidikan yang pernah diikuti oleh seseorang akan membentuk pengetahuannya. Selanjutnya pengetahuan seseorang akan menuntun tindakan maupun perbuatannya. Penerimaan dan penolakan terhadap konsep-konsep baru selalu mendapat penolakan apalagi bila tidak mempunyai pengetahuan yang luas terhadap hal baru tersebut. Itulah yang terjadi pada pejabat pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan pada umumnya dimana pengetahuan mereka terhadap konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha sangat minim dikarenakan sosialisasi dari konsep ini yang sangat kurang.

Aspek Budaya

Budaya birokrasi kita sangat dipengaruhi oleh budaya paternalistik. Banyak hasil penelitian yang menyatakan hal ini. Mulai dari sistem rekrutmen, penempatan seseorang dalam jabatan sampai hal yang bersifat penghormatan dan ketergantungan yang tinggi dengan atasan. Pola-pola hubungan yang terbentuk tidak mendorong munculnya kreatifitas dan inovasi. Etos kerja dan motivasi pegawai juga tidak terbentuk dengan baik karena sistem insentif yang dibangun tidak mendorong kearah sana. Aspek budaya sangat mempengaruhi

pola pikir dan perubahan yang akan dilakukan oleh seseorang. Budaya yang tidak mendukung adanya suatu perubahan sangat sulit sekali untuk menerima sesuatu hal yang baru.

Pemerintahan yang bergaya wirausaha tidak memberikan tempat pada budaya paternalistik, hirarki yang kaku dan terpaku pada aturan-aturan yang permanen. Keluwesan pada aturan, inovasi, kreatifitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas selalu menjadi pendorong untuk terciptanya pemerintahan yang bergaya wirausaha selama tidak bertentangan dengan misi yang diemban organisasi.

Berikut ini wawancara penulis dengan salah seorang pejabat eselon III di BKD sebagai berikut : “Salah satu masalah penting yang kita hadapi dalam membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bergaya wirausaha adalah adanya budaya paternalistik yang mengakar kuat dalam pemerintahan saat ini, Hubungan atasan bawahan yang kaku selalu mematikan inovasi dan kreatifitas. Yang sering terjadi adalah ketakutan dan ketergantungan pegawai yang besar pada atasan, pegawai tidak berani mengambil keputusan sebelum meminta petunjuk dengan atasan”. (2 Oktober 2014).

Entrepreneurial Government dalam budaya kerja. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa pejabat eselon IV dan III di BKD ; “Seingat saya belum ada sebuah usaha dari pemerintah daerah untuk mengembangkan semangat kewirausahaan dilingkungan organisasi pemda” (2 Oktober 2014). “Pembentukan budaya kerja sangat susah bila tidak disadari oleh semua komponen apalagi mengembangkan budaya yang mengandung prinsip-prinsip kewirausahaan dalam sebuah pemerintahan yang tidak mendorong budaya kearah itu. Kita bisa contohkan sistem insentif bagi pegawai yang ada selama ini tidak mencerminkan spirit kewirausahaan karena insentif yang diberikan tidak didasarkan pada kinerja seseorang”. (2 Oktober 2014).

Terlihat jelas dari dari hasil wawancara bahwa pemerintah daerah belum mengembangkan semangat kewirausahaan dalam budaya kerja birokrasinya. Salah satu strategi dalam mengembangkan kewirausahaan adalah strategi budaya. Strategi ini dilakukan dengan mengubah kebiasaan, menyentuh perasaan dan mengubah pikiran atau pandangan seseorang terhadap suatu hal.

Dari ungkapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembentukan budaya komunikasi yang dua arah dan terbuka belum dikembangkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan budaya merupakan suatu yang sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Budaya yang berkembang dalam sebuah lingkungan akan menentukan cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Budaya juga akan memberikan

penilaian tentang penerimaan ataupun penolakan terhadap sebuah ide atau konsep yang akan dikembangkan kedalam sebuah organisasi, seperti pengembangan konsep dan nilai-nilai pemerintahan yang bergaya wirausaha dalam organisasi pemda.

SIMPULAN

Pandangan dan pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep *Entrepreneurial Government*, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih sangat rendah pengetahuan pejabat birokrasi terhadap ide; dan rendahnya pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep; rendahnya pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan modern. Adanya penolakan dan rendahnya pemahaman terhadap konsep *Entrepreneurial Government* membuat pejabat birokrasi sulit memahami faktor-faktor penjas persepsi konsep *Entrepreneurial Government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Caiden, G.E., 1991, *Administrative Reform Comes of Age*, New York, N.Y : De Gruyter.
- Osborne, David and Ted Gabler, 1992, *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, A Reading MA : Addison Wesley Longman, Inc.
- Osborne, David and David Plastrik, P. 1997, *Banishing Bureacracy : The Five Strategies for Reinventing Government*, A Reading MA : Addison Wesley Publishing Company, Inc.